

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PESANTREN MU'ADALAH DI DIRASATUL MUALIMIN ISLAMIYAH AL-HAMIDY¹

Siswanto

(Dosen STAIN Pamekasan, email: siswanto_1978@yahoo.co.id)

Abstrak: Perhatian dan pengakuan pemerintah terhadap institusi pesantren khususnya yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal masih sangat minim, bahkan tamatan pesantren belum mendapat pengakuan. Padahal selama ini, masyarakat telah memberikan pengakuan terhadap kualitas lulusan pesantren, dan bahkan sebagian dari lembaga pendidikan di luar negeri pun telah memberikan pengakuan terhadap pendidikan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan Pesantren Mu'adalah di Dirasatul Mu'alimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuaanyar Palengaan Pamekasan disusun secara berjenjang berdasarkan tingkat pendidikan yang terdiri atas tingkat Ula, Wutsha dan 'Ulya. *Kedua*, strategi pencapaian standar kompetensi lulusan pesantren mu'adalah dilaksanakan melalui pengaturan waktu pembelajaran antara pendidikan formal dan non formal, proses pembelajaran ditekankan pada strategi pembelajaran aktif, evaluasi kurikulum yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, dan rekrutmen ustadz atau tenaga pengajar yang dilaksanakan dengan proses yang sangat ketat. *Ketiga*, prospek lulusan pesantren mu'adalah dapat diketahui dari adanya pengakuan oleh pemerintah, yaitu kesetaraan ijazah lulusan pesantren ini seperti halnya pengakuan pada lulusan lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan Madrasah Aliyah, sehingga lulusan pesantren mu'adalah ini bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik negeri, maupun swasta, dan bisa juga bekerja, baik di sektor formal maupun non formal.

Kata kunci: Standar Kompetensi, Lulusan, Pesantren Mu'adalah

¹Artikel ini merupakan hasil penelitian kolektif yang beranggotakan Maimun dan Mohammad Thoha.

Abstract: *The attention and recognition of government to the institution of boarding school particularly that is not held a formal education is still very low, moreover, to the graduates of boarding schools have not received the recognition. Whereas, up till now, the society has given the recognition to the quality of the graduates from boarding schools and even some of the educational institutions in abroad also has given recognition to the boarding school of education. The result of research shows that the standard competence of graduates from Mu'adalah boarding school in Dirasatul Mu'alimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuaanyar Palengaan Pamekasan is arranged gradually based on the level of education consisting of Ula, Wutsha and 'Ulya level. The second one, the strategies to attainment the standard competence of the graduates of Mu'adalah boarding school is implemented by arrangement of learning time between formal and nonformal education, learning process focusing on the active learning strategies, evaluation of curriculum implemented gradually and continuously, and recruitment of teachers or preachers who carried out the process very tight. The third, the prospect of the boarding school graduates is able to be known from the recognition by the government, namely the equivalence diploma graduates of boarding schools as well as recognition at the graduate institutions of formal education in Madrasah Aliyah level. Therefore, the graduates of Mu'adalah boarding school are able to continue their education into the universities either state or private, and also to work, both in the formal and informal sectors.*

Keywords: *Standard Competency, Graduates, Mu'adalah Boarding School*

Pendahuluan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan merupakan realitas yang tak dapat dipungkiri. Sepanjang sejarah yang dilaluinya, pesantren terus menekuni pendidikan tersebut dan menjadikannya sebagai fokus kegiatan. Dalam mengembangkan pendidikan, pesantren telah menunjukkan daya tahan yang cukup kokoh sehingga mampu melewati berbagai zaman dengan beragam masalah yang dihadapinya. Dalam sejarahnya itu pula, pesantren telah menyumbangkan sesuatu yang tidak kecil bagi Islam di negeri ini.²

²Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 15.

Kehadiran pesantren sebagai institusi pendidikan mampu memberikan sumbangan penting dan krusial dalam proses transmisi ilmu-ilmu Islam, reproduksi ulama, pemeliharaan ilmu dan tradisi Islam, bahkan pembentukan dan ekspansi masyarakat muslim santri.³ Pesantren menjadi bagian infrastruktur masyarakat yang secara makro telah berperan menyadarkan masyarakat untuk memiliki idealisme, kemampuan intelektual dan perilaku yang baik guna menata dan membangun karakter bangsa. Pesantren secara berkesinambungan berusaha membentuk perilaku masyarakatnya.⁴

Dengan pola kehidupannya yang unik, pesantren mampu bertahan selama berabad-abad untuk mempergunakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Dalam jangka panjang, pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat dari pada masyarakat di sekitarnya. Kedudukan ini dapat dilihat dari kemampuan pesantren untuk melakukan transformasi total tanpa harus mengorbankan identitas dirinya.⁵

Di samping itu, pesantren juga dipandang sebagai laboratorium sosial kemasyarakatan. Hal itu dapat dilihat dari peran pesantren dalam melakukan transformasi sosial,⁶ sekaligus memberikan kontribusi penting dalam sejarah pembangunan Indonesia.⁷ Pesantren menjadi sebuah lembaga pendidikan ideal karena menyediakan laboratorium kecakapan hidup yang sangat bermanfaat bagi keilmuan dan aktualisasi diri para santri.⁸

Sungguhpun demikian, perlu disadari bahwa selama ini perhatian dan pengakuan pemerintah terhadap institusi pesantren khususnya yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal masih sangat minim, bahkan tamatan

³Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 184-185.

⁴Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.117.

⁵Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.10. Secara umum, pesantren tetap memiliki fungsi untuk melakukan transfer ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) dan nilai-nilai Islam (*Islamic values*), melakukan kontrol sosial (*social control*), dan melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Lihat M. Sulthon dan Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global* (Yogyakarta: Laksbang, 2006), hlm. 8.

⁶Amin Haedari, et al, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global* (Jakarta:IRD Press, 2004), hlm. 178.

⁷Ahmad Barizi, *Pendidikan Integratif, Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 41. Lihat juga Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 49.

⁸M. Dian Nafi', et.al. *Praksis Pembelajaran Pesantren* (Yogyakarta: Institute of Training and Development (ITD), 2007), hlm.55.

pesantren belum mendapat pengakuan, sehingga sering menemui kesulitan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk melamar pekerjaan pada sektor formal. Padahal selama ini, masyarakat telah memberikan pengakuan terhadap kualitas lulusan pesantren, dan bahkan sebagian dari lembaga pendidikan di luar negeri pun telah memberikan pengakuan terhadap pendidikan pesantren.⁹

Bahkan peranan pendidikan pesantren dalam pelaksanaan pendidikan nasional dapat dilihat dalam kaitannya sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Pesantren merupakan lembaga yang berfungsi melaksanakan pendidikan berdasarkan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan fungsi khusus yang dibawakan oleh pendidikan pesantren, pendidikan nasional akan menunjukkan dinamikanya secara mantap.¹⁰

Sejak Indonesia merdeka, telah lahir beberapa Undang-undang Sistem Pendidikan yang merugikan pesantren, mulai dari UU No.4 tahun 1950, UU No.14 PRPS tahun 1965, UU No.19 PNPS, hingga UU SPN No.2 tahun 1989. Kesemuanya tidak mencantumkan pengakuan formal terhadap pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dan menafikan jasa pesantren dalam pembentukan sistem pendidikan nasional.¹¹ Namun, dengan lahirnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan No. 19 tahun 2005, pendidikan pesantren telah mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah.¹²

Bentuk pengakuan pemerintah kepada pondok pesantren yang tidak menerapkan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah diwujudkan dengan pendidikan pesantren *mu'adalah*. Pendidikan pondok pesantren tersebut disetarakan dengan MA melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI dan disetarakan dengan SMA melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), hlm. 3.

¹⁰Dedi Djubaiedi, "Pemaduan Pendidikan Pesantren-Sekolah: Telaah Teoritis dalam Perspektif Pendidikan Nasional" dalam ed. Marzuki Wahid, et.al. *Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm.184.

¹¹KH. Mohammad Tidjani Djauhari, *Masa Depan Pesantren, Agenda yang Belum terselesaikan* (Jakarta: TAJ Publishing, 2008), hlm. 80.

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan*, hlm.3.

Proses penyataran ini adalah langkah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan pendidikan pesantren.

Dalam pengamatan peneliti, Dirasatul Muallimin Islamiyah Al-Hamidy merupakan satu-satunya pondok pesantren yang menyelenggarakan program *mu'adalah* di Kabupaten Pamekasan. Pesantren ini telah memperoleh status *mu'adalah* sejak tahun 2006 dan diperpanjang pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren No. DJ.I/885/2010, dan dikuatkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.1/65/2013 tentang Penetapan Status Kesetaraan (Mu'adalah) satuan pendidikan keagamaan pada pondok pesantren dengan madrasah aliyah/sederajat, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2013. Pesantren ini disetarakan statusnya dengan Madrasah Aliyah formal di bawah Departemen Agama. Pesantren ini juga telah banyak menghasilkan lulusan yang tersebar luas di wilayah Madura dengan berbagai kompetensi yang dimiliki.

Penulis juga mengamati bahwa tidak semua pesantren menyelenggarakan *mu'adalah*. Hanya beberapa pondok pesantren yang memenuhi kriteria yang dapat menyelenggarakan pesantren *mu'adalah* tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik meneliti tentang standar kompetensi lulusan pesantren mu'adalah di Dirasatul Muallimin Islamiyah al-Hamidy Banyuwangi Pamekasan.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka masalah penelitian ini difokuskan pada: 1) Standar kompetensi bagi lulusan pesantren mu'adalah di Dirasatul Muallimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuwangi Palengaan Pamekasan; 2) Strategi pencapaian standar kompetensi lulusan pesantren mu'adalah di Dirasatul Muallimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuwangi Palengaan Pamekasan; dan 3) Prospek lulusan pesantren mu'adalah di Dirasatul Muallimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuwangi Palengaan Pamekasan.

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan pemikiran dalam bidang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan penguatan kompetensi lulusan pesantren mu'adalah.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran pihak-pihak yang berkepentingan, terutama: 1) Bagi para pemikir dan praktisi pendidikan dalam mengembangkan standar kompetensi lulusan pesantren mu'adalah; 2) Bagi pemerintah, untuk lebih adaptif dalam membuat kebijakan dan regulasi untuk mengakui bagi lulusan pesantren mu'adalah sehingga memiliki pengakuan yang sama dengan lulusan pendidikan formal; dan 3) Bagi pesantren untuk mengambil langkah strategis

dan inovatif untuk senantiasa mengembangkan sistem pendidikannya dan mewujudkan lulusan yang berkualitas.

Kajian tentang pesantren telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik yang berupa hasil penelitian, artikel maupun dalam bentuk buku. Namun, penelitian tentang pesantren mu'adalah bisa dikatakan masing-masing jarang dilakukan. Di antara penelitian tentang hal tersebut adalah apa yang diteliti oleh Mastuhu¹³ tentang dinamika sistem pendidikan pesantren. Hasil penelitiannya terdiri dari butir-butir positif dari sistem pendidikan pesantren yang perlu dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional (dengan melalui berbagai penyesuaian dengan tantangan zamannya), butir-butir negatif yang dari sistem pendidikan pesantren yang tidak perlu dikembangkan lebih lanjut dalam sistem pendidikan nasional, butir-butir *plus-minus*, yaitu butir-butir yang perlu dikembangkan lebih lanjut dari sistem pendidikan nasional, tetapi sebelumnya harus disempurnakan lebih dulu dan bentuk pendidikan pesantren masa depan seharusnya merupakan sekolah (madrasah) dengan kurikulum 30% moral (agama), 70% akal (pengetahuan umum) dan dilaksanakan dalam kultur pesantren lengkap dengan konsep "asrama masa depan" yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang diasuhnya, serta mampu menciptakan program-program kegiatan ilmiah sesuai dengan tantangan zamannya.

Sementara itu, M. Ridwan Nasir¹⁴ meneliti tentang dinamika pengelolaan sistem pendidikan di beberapa pondok pesantren Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan model *multi-case study*. Arah penelitian ini adalah membandingkan model pendidikan Islam (pesantren, madrasah dan sekolah umum) untuk diketahui tipe yang ideal dalam membentuk kepribadian santri. Hasil penelitiannya mengemukakan beberapa hal yaitu pola kepemimpinan kiai yang ada di pondok pesantren Kabupaten Jombang sangat variatif, pola kepemimpinan rasional yang bersifat kolektif dipandang lebih sesuai untuk memacu perkembangan pendidikan pesantren, kualitas pendidikan pesantren sangat tergantung pada kualitas pengasuhnya, adanya pergeseran nilai-nilai pesantren, nilai-nilai positif yang perlu dikembangkan dan nilai-nilai negatif yang perlu ditinggalkan, pembaharuan mental dibangun menjadi mental membangun, pesantren dituntut juga untuk memberikan pendidikan yang berhubungan dengan keterampilan kerja tangan, sehingga menghasilkan tenaga produsen, bukan tenaga konsumen, dan perpaduan antara sistem pesantren dengan sistem

¹³ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994).

¹⁴M. Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

madrasah merupakan sistem yang relevan dengan kondisi masyarakat dewasa ini.

Secara khusus, Marwan Salahuddin¹⁵ meneliti tentang kebijakan pesantren mu'adalah dan realisasinya di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma *interpretative social science*, penelitian ini menemukan bahwa: a) kebijakan pemerintah untuk mengangkat pendidikan pesantren menjadi subsistem pendidikan nasional sudah mulai tampak hasilnya, namun upaya untuk menjadikan pesantren sebagai satuan pendidikan formal hingga saat ini belum berhasil. b) realisasi kebijakan di pesantren Tremas dimanifestasikan melalui kurikulum *madrasi* dan *ma'hadi*, dengan tetap mempertahankan model salafiyah. c) adanya persepsi yang berbeda antara kyai sebagai pengelola pesantren dengan pihak pemerintah tentang status mu'adalah.

Sedangkan Syaiful Anam¹⁶ meneliti tentang manajemen kurikulum pesantren mu'adalah di Dirasatul Muallimin Islamiyah Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: a) Kelebihan kurikulum lebih menitikberatkan pada disiplin ilmu-ilmu keagamaan, sehingga penguasaan santri mengenai ilmu keagamaan lebih matang dan meyakinkan dibandingkan dengan institusi pendidikan formal lainnya. b) Perencanaan kurikulum dilakukan dengan membentuk tim penyusun kurikulum. Strategi penyampaian kurikulum menitikberatkan kepada peran siswa dalam proses pembelajaran. Pengorganisasian kurikulum dimulai dari pengorganisasian elemen pelaksanaannya yakni guru dan tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan fungsi berdasarkan tugas masing-masing yang dilanjutkan dengan pengorganisasian materi pelajaran yang dikemas secara rapi dalam satu skema pembelajaran. Sedangkan evaluasi kurikulum diselenggarakan melalui *Ikhtibar al-daury* dan *Tamrin* yang pelaksanaannya tergantung pada guru masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti melihat kajiannya menekankan pada aspek nilai-nilai pesantren baik nilai positif dan negatif, model ideal pendidikan Islam yang dapat dikembangkan dalam komunitas pesantren, kebijakan pemerintah pada pesantren mu'adalah dan manajemen kurikulum mu'adalah. Meskipun demikian, peneliti mengakui bahwa tema dalam penelitian ini bukan merupakan sesuatu yang baru, sehingga posisi penelitian ini adalah

¹⁵Marwan Salahuddin, "Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Realisasinya di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan", *Disertasi* (Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

¹⁶Syaiful Anam, "Manajemen Kurikulum Pesantren Mu'adalah di Dirasatul Muallimin Islamiyah Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan", *Tesis* (Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

sebagai penelitian lanjutan dan pengembangan. Namun, dilihat dari sisi kompetensi lulusan pesantren mu'adalah – sepanjang pengetahuan peneliti – belum ada penelitian yang mengangkat tema dimaksud, sehingga penelitian tentang kompetensi lulusan pesantren mu'adalah ini menemukan signifikansinya.

Metode Penelitian

Untuk mengungkap dan mendeskripsikan fokus penelitian diperlukan pengamatan yang mendalam pada situasi yang wajar atau alamiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif,¹⁷ tentang kompetensi lulusan pesantren mu'adalah di Dirasatul Mualimin Islamiyah al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh), sehingga dalam hal ini peneliti tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.¹⁸ Jenis penelitian ini berkategori penelitian kasus, yakni penelitian mendalam terhadap objek (manusia, peristiwa, latar, atau dokumen) dengan maksud memahami interelasi antar variabelnya.¹⁹ Adapun ciri-ciri penelitian kasus antara lain adalah: 1) Sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. 2) Sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabelnya.²⁰

Orientasi teoritik dari penelitian ini berpijak pada fenomenologis, di mana peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang ada dalam situasi tertentu.²¹ Dalam penelitian ini jenis datanya adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh subyek penelitian sesuai dengan seperangkat pertanyaan yang dikemukakan peneliti dengan merujuk

¹⁷R.C. Bogdan dan S.J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences* (New York: John Wiley and Sons, Inc. 1985). Lihat juga Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 197.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 4.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.142.

²⁰Imron Arifin, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996), hlm.57.

²¹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 14. Lihat juga Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 64-65.

pada fokus penelitian yang ada sebagai pedoman. Sedangkan sumber datanya adalah manusia dan non manusia. Sumber data manusia adalah pengasuh, ustadz/pengurus pesantren dan santri. Data tersebut dirumuskan dalam bentuk transkrip wawancara dan catatan lapangan. Sedangkan sumber data non manusia dilakukan dengan jalan analisis dokumentasi.

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah pengasuh, pengurus pesantren dan santri. Pengasuh dipilih menjadi subyek penelitian dengan alasan bahwa seorang pengasuh memegang peranan penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan pesantren dan menjadi pihak yang banyak mengetahui tentang persoalan ini. Dalam artian bahwa pengasuh banyak mengetahui tentang standar kompetensi lulusan di lembaga ini.

Pengurus dipilih menjadi subyek penelitian juga karena ia juga terlibat dalam pengembangan kompetensi lulusan di pesantren tersebut. Santri dipilih sebagai subyek penelitian karena mereka juga terlibat dalam proses pengembangan kompetensi lulusan dan sebagai subyek didik dengan pernyataan-pernyataan mereka yang digali dari proses pengumpulan data berdasarkan fokus penelitian akan lebih memperjelas tentang kompetensi lulusan yang dikembangkan. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif-eksploratif, dengan melibatkan 3 (tiga) komponen analisis, yaitu: a) reduksi data (*data reduction*), b) penyajian data (*data display*), dan c) penarikan kesimpulan. Ketiga komponen analisis tersebut bersifat interaktif. Pada tahap reduksi data dilakukan kategorisasi dan pengelompokan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang lebih penting, yang bermakna, dan yang sesuai dengan tujuan studi. Selama reduksi data, peneliti dapat meringkas, mengkode dan menemukan tema. Melalui reduksi ini pula, peneliti melakukan penajaman dalam mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi untuk dijadikan temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti.

Sementara itu, pengecekan keabsahan temuan dilakukan melalui perpanjangan kehadiran peneliti, observasi secara mendalam, triangulasi, pengecekan anggota, pengecekan teman sejawat, dan pelacakan kesesuaian hasil (kecukupan referensial).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Standar Kompetensi bagi Lulusan Pesantren Mu'adalah di Dirasatul Muallimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuwangi Palengaan Pamekasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, setiap lembaga pendidikan diharuskan dapat memenuhi delapan standar nasional pendidikan. Hal ini dianggap penting karena pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan. Setiap proses yang bertujuan tentunya mempunyai ukuran atau *yardstick* sudah sampai di mana perjalanan kita di dalam mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan tujuan fisik seperti jarak suatu tempat atau suatu target produksi, tujuan pendidikan merupakan suatu yang *intangible* dan terus menerus berubah dan meningkat. Tujuan pendidikan selalu bersifat sementara atau "tujuan yang berlari". Hal ini berarti tujuan pendidikan setiap saat perlu direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Di antara standar tersebut adalah standar kompetensi lulusan.

Pesantren Mu'adalah di Dirasatul Mu'alimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuwangi Palengaan Pamekasan telah memiliki standar kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikannya. Standar kompetensi tersebut disusun secara berjenjang berdasarkan tingkat pendidikan yang terdiri atas tingkat Ula, Wustha dan 'Ulya yang dalam pelaksanaannya masing-masing ditempuh selama 3 tahun pelajaran. Sehingga keseluruhan pendidikan Pesantren Mu'adalah di Dirasatul Mu'alimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuwangi ditempuh selama 9 (Sembilan) tahun.²² Pemetaan ini dimaksudkan agar para santri dapat menguasai materi sesuai dengan perkembangan usia masing-masing. Hal ini sangat penting diterapkan untuk memudahkan pemahaman mereka, sehingga tidak terjadi kesulitan dalam proses pembelajaran.²³

Namun demikian, pada tingkat Ula diberi kesempatan kepada para santri untuk menempuh sistem pembelajaran akselerasi dalam rangka mewadahi mereka agar bisa menguasai standar kompetensi yang sudah dipetakan pada tingkat Ula relatif lebih cepat dari 3 tahun. Pada realitasnya, memang banyak santri yang hanya menempuh tingkat Ula dalam 5 bulan bahkan ada yang 3 bulan langsung mengikuti tes untuk kenaikan tingkat ke Wustha. Program akselerasi dilaksanakan karena pada tingkat Ula merupakan tingkat *isti'dad* (persiapan) menuju program yang inti yaitu di tingkat Wustho dan Uliya.²⁴

Berkenaan dengan segala ketentuan tentang penetapan standar kompetensi, sistem kenaikan kelas dan pelulusan, lembaga pendidikan ini

²²Hasil Wawancara dengan Ahmad Syauqi, *Guru Madrasah Putri Tingkat Wustha*, Ahad 5 Juli 2013.

²³Hasil Wawancara dengan Nurul Huda, *Guru Tingkat Wustha*, Wawancara Langsung, Tanggal 7 Agustus 2013.

²⁴Hasil Wawancara dengan RKH. Abrori, *Pengasuh PP al-Hamidy Banyuwangi*, Wawancara langsung, Tanggal 21 Agustus 2013.

memberlakukan secara sama antara santri putra dan putri, meskipun selama ini komposisi santri putra selalu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah santri putri. Hal ini dimaksudkan agar semua lulusan pesantren ini memiliki kompetensi yang sama.

Pesantren ini berobsesi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang merata bagi semua santri, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun kadang-kadang diasumsikan bahwa kalau perempuan cukup paham masalah haid dan najis. Tetapi kalau kita tidak demikian, semua pengetahuan mesti dikuasai oleh mereka.²⁵

Secara umum, standar kompetensi tersebut menekankan pada penajaman materi keagamaan, baik yang bersifat klasik maupun masalah kontekstual kontemporer, dengan memperhatikan tingkat penalaran santri terhadap masalah-masalah keagamaan (*al-masail al-diniyyah*).²⁶ Standar kompetensi lulusan pada masing tingkatan tersebut adalah:

- a. Standar kompetensi lulusan tingkat Ula adalah pemahaman dan pengamalan *Fiqh Ubudiyah*. Standar kompetensi ini dipecah menjadi beberapa kompetensi dasar yang meliputi thaharah, shalat, puasa, zakat, haji dengan segala cabang dan rinciannya. Demikian pula dalam sistem pembelajarannya, kajian teoritis senantiasa diperdalam dengan praktik sehingga pembelajaran berjalan dengan lebih efektif. Bagi santri yang belum memiliki kecakapan dalam baca tulis dan hitung huruf latin, diberikan tambahan pelajaran melalui ekstra kurikuler. Hal ini diharapkan agar para lulusan tidak hanya cakap dalam mempelajari materi agama yang berbahasa Arab saja, melainkan mereka juga bisa mengakses bahan pelajaran dengan bahasa selain Arab.
- b. Standar kompetensi lulusan untuk tingkat Wustha adalah seperangkat pelajaran pokok (*fann wajib*) yang ditekankan adalah penguasaan Nahwu dan Sharaf. Kitab Nahw yang dijadikan pegangan wajib adalah Kitab 'Imrity (dari awal sampai selesai sebanya 253 bait) untuk kelas 1 Wustha, seperempat (250) bait pertama kitab Alfyyah Ibn Malik untuk kelas 2 dan seperempat (250) bait kedua kitab Alfyyah Ibn Malik untuk kelas 3. Sedangkan sisanya akan diajarkan di tingkat 'Ulya. Pelajaran Fiqh dan materi selain Nahwu Sharraf tidak lagi menjadi standar kompetensi utama, karena secara dasar telah dikuasai di tingkat Ula. Untuk tetap memberikan pengayaan kajian fiqh

²⁵Hasil Wawancara dengan Nurul Huda, *Guru DMI al-hamidi tingkat Wustha*, Wawancara langsung tanggal 7 Agustus 2013

²⁶Hasil Wawancara dengan Badri, *Rais (kepala) Madrasah Ulya Pesantren*, Ahad 5 Agustus 2013.

dan lainnya, maka semua santri diwajibkan mengikuti kajian-kajian (pengajian) pesantren di luar jam pelajaran wajib.²⁷ Kompetensi utama yang ditekankan di tingkat Wustha ini adalah kemampuan santri dalam membaca kitab-kitab klasik (kitab kuning) secara mandiri, sehingga membantu mereka pada sistem pembelajaran kelas 'Ulya, yaitu sistem diskusi (musyawarah), dimana mereka sudah harus mampu mengeksplorasi rujukan-rujukan kitab kuning secara mandiri.²⁸ Pengembangan kompetensi dimaksudkan agar santri di tingkat ini memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu nahwu dan sharraf, sehingga akan memudahkan mereka untuk belajar membaca kitab kuning. Penguasaan kitab kuning tidak dapat dipisahkan dari penguasaan ilmu tata bahasa, yaitu Nahwu dan Sharraf.

- c. Standar kompetensi lulusan tingkat 'Ulya adalah kemandirian santri dalam mengambil rujukan permasalahan keagamaan (*al-masail al-diniyyah*) yang akan mereka hadapi di masyarakat. Sistem pembelajaran dan kurikulum tingkat 'ulya sudah menekankan pada pemahaman kaidah Nahw tingkat akhir yaitu seperempat (250) bait ketiga Alfiyah Ibn Malik untuk kelas 1 dan seperempat (250) bait terakhir dari Alfiyah Ibn Malik untuk kelas 2 'Ulya. Sedangkan untuk kelas 3 'Ulya standar kompetensinya adalah mampu menganalisis produk hukum berdasarkan redaksional dari berbagai rujukan kitab kuning.²⁹ Sehingga pada kelas akhir di tingkat ini, semua santri diharapkan dapat melakukan telaah berbagai persoalan hukum merujuk pada beberapa kitab kuning yang *mu'tabarah*.³⁰

Berkenaan dengan hal tersebut, pesantren mu'adalah sebagai pendidikan keagamaan Islam dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fi*

²⁷Hasil Wawancara dengan Nurul Huda, *Guru Tingkat Wustha*, Wawancara langsung tanggal 7 Agustus 2013

²⁸Hasil Wawancara dengan Ahmad Syauqi, *Guru Madrasah Putri Tingkat Wustha*, Ahad 5 Juli 2013.

²⁹Hasil Wawancara dengan Badri, *Rais (kepala) Madrasah Ulya Pesantren*, Ahad 5 Agustus 2013.

³⁰Hasil Wawancara dengan Miftahul Hidayat, *Santri Kelas 3 Tingkat Ulya*, 6 Agustus 2013.

al-din) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.³¹

Dengan adanya standar tersebut, maka harapan masa depan bisa diprediksi, apalagi dengan dukungan kemajuan sains dan teknologi yang semakin imperatif dalam kehidupan bangsa. Dalam konteks pendidikan, bahwa standarisasi hanya merupakan ikhtiar manusia dalam mengantisipasi dan memprediksi hasil pendidikan di masa depan.³² Penetapan standar ini merupakan proses harus dilakukan untuk dijadikan patokan dalam rangka menghasilkan sesuatu lebih baik dan berkualitas unggul sesuai dengan harapan konsumen atau masyarakat pengguna (*stakeholders*).³³

Standar kompetensi lulusan sebagaimana disebut di atas dirumuskan secara mandiri oleh Dirasatul Mu'allimin Islamiyah Al-Hamidy. Hal ini disesuaikan dengan kondisi pesantren dan perkembangan keilmuan saat ini. Meskipun sebenarnya, pemerintah memberikan kisi-kisi standar kompetensi bagi madrasa mu'adalah. Namun bagi madrasah yang sudah lolos verifikasi, termasuk Pesantren Mu'adalah ini, kisi-kisi tersebut cenderung tidak dipakai, karena justru standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah relatif lebih mudah (rendah) dibandingkan dengan standar kompetensi yang ditetapkan pesantren. Penetapan standar kompetensi sendiri ditetapkan oleh rapat pleno yang diselenggarakan setiap akhir tahun pelajaran yang dihadiri oleh beberapa unsur yang terdiri atas majelis keluarga pengasuh pesantren, dewan guru dari semua tingkatan, guru senior yang terdiri dari alumni yang pernah menjadi pengurus atau ustadz selama menjadi santri di Pesantren Mu'adalah ini. Rapat tersebut akan mengevaluasi standar kompetensi yang telah dijalankan pada tahun pelajaran tersebut. Tidak jarang hasil evaluasi tersebut merekomendasikan peningkatan atau perubahan standar kompetensi untuk tahun pelajaran yang akan datang. Para ustadz sebagai unsur yang mengetahui secara pasti perkembangan pendidikan dilibatkan secara penuh dalam penetapan standar kompetensi tersebut. Sehingga mereka juga bertanggung jawab terhadap ketercapaian standar kompetensi yang telah dirumuskan bersama.³⁴

³¹Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 26.

³²Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.22.

³³H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 21.

³⁴Hasil Wawancara dengan Badri, *Rais (Kepala) Madrasah Ulya*, Tanggal 5 Agustus 2013.

Lebih lanjut, pengasuh ini mengakui bahwa memang ada standar kompetensi lulusan yang disarankan oleh Dirjen Pendais Kemenag untuk diikuti, tapi karena materinya terlalu rendah dan kurang sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini, maka tidak semuanya dipatuhi, kalau dipresentasikan perimbangannya antara 10% standar dari kemenag dan 90 % sisanya merupakan SKL yang dibuat sendiri oleh DMI al-Hamidi secara mandiri. Bahkan tidak hanya pada penentuan Standar kompetensinya, tapi juga program-program lain yang sifatnya instruktif dari pemerintah dalam hal ini kemenag, DMI melaksanakannya dengan memperhatikan syarat minimal, yang penting ada yang dilaksanakan, selebihnya mayoritas waktu dimaksimalkan untuk program-program pesantren.³⁵

Sebenarnya kegiatan-kegiatan yang disarankan oleh pemerintah untuk dilaksanakan di DMI, secara substansial sudah ada di Pesantren, seperti misal kegiatan Pramuka yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa gotong royong, keteladanan, keorganisasian, kemandirian, dsb, semua tujuan tersebut juga sudah tercover dalam kegiatan-kegiatan rutin di pesantren walaupun dengan nama program yang berbeda.³⁶

Di samping alasan di atas, penetapan SKL sendiri oleh DMI didasarkan pada upaya mempertahankan jati diri pesantren yang sudah lama berdiri, itulah pesantren al-Hamidy dengan segala latar belakang dan sejarahnya yang sudah mengakar di masyarakat baik nasional maupun internasional sebagai penjaga, pemerhati, dan sekaligus pengembang khazanah ilmu-ilmu agama Islam baik klasik maupun kontemporer sehingga jati diri tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Maka dari itu, di samping diajarkan materi-materi untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan, para santri juga diberikan pelajaran ekstra kurikuler seperti bahasa Inggris, teknik berceramah (khitabah), ilmu jiwa sosial dan sebagainya. Pemberian pelajaran ekstra kurikuler ini dianggap penting mengingat ilmu-ilmu terapan tersebut sangat dibutuhkan mereka dalam kehidupan di luar pesantren, apalagi semua lulusan tingkat 'ulya di Pesantren Mu'adalah di Dirastul Mu'allimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan, diwajibkan mengabdikan sebagai guru tugas selama 2 tahun penuh (berbeda dengan pesantren lain yang biasanya hanya 1 tahun). Mereka dikirim ke lembaga-lembaga pendidikan yang mengusulkan atau meminta guru tugas, yang biasanya lembaga tersebut didirikan atau dipimpin alumni. Penempatan guru

³⁵Ibid.

³⁶Ibid.

tugas tersebut tidak terbatas di Madura dan Jawa saja, melainkan selama ini banyak yang dikirim ke Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Bali dan NTB. Dalam hal ini, kewajiban mengabdikan sebagai guru tugas hanya diberlakukan kepada lulusan santri putra, sedangkan lulusan yang santri putri hanya diwajibkan mengabdikan di dalam pesantren baik sebagai pengurus pesantren atau staf pengajar (jika dibutuhkan dan memenuhi syarat).³⁷ Tujuannya untuk membekali mereka dengan bekal tambahan selain ilmu-ilmu agama.³⁸

Sesuai dengan semangat kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan kompetensi lulusan pada lembaga pendidikan memang menjadi wewenang lembaga pendidikan itu sendiri, baik dari penyusunan dan pengembangannya. Demikian pula dalam mengimplementasikan, memonitor, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Pengembangan kompetensi lulusan tersebut dapat berisi muatan lokal dan *life skill* sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat. Hal ini dipahami karena pesantren lebih banyak mengetahui keadaan dan kebutuhan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di pesantren ini merupakan proses siklus yang tiada akhir. Pengembangan kompetensi merupakan proses komprehensif yang memfasilitasi suatu analisis tujuan, mendesain program, mengimplementasikan serangkaian aktivitas yang terkait, dan alat untuk mengevaluasi proses.³⁹ Pengembangan kompetensi menjadi wewenang lembaga pendidikan yang didalamnya dapat berisi muatan lokal dan *life skill* sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pesantren mu'adalah ini dapat mengembangkan, menjabarkan, bahkan menambah bahan kajian atau mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Sehingga di samping diajarkan materi-materi untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan, para santri juga diberikan pelajaran ekstra kurikuler seperti bahasa Inggris, teknik berceramah (khitabah), ilmu jiwa sosial dan sebagainya. Hal ini dianggap penting mengingat ilmu-ilmu terapan tersebut sangat dibutuhkan mereka dalam kehidupan di luar pesantren, apalagi semua lulusan Tingkat 'Ulya diwajibkan mengabdikan sebagai guru tugas selama 2 tahun penuh (berbeda dengan pesantren lain yang biasanya

³⁷Hasil Wawancara dengan Nurul Huda, *Guru Tingkat Wustha*, Tanggal 7 Agustus 2013.

³⁸Hasil Wawancara dengan Moh. Bahri, *Murid DMI kelas I A Tingkat Ulya*, tanggal 22 Agustus 2013.

³⁹John Wiles dan Josep Bondi, *Curriculum Development, A Guide to Practice* (New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2002), hlm. 101.

hanya 1 tahun) di daerah Jawa ataupun luar Jawa. Rumusan kurikulum pendidikan pesantren ini mencerminkan keseimbangan profesional dan proporsional dalam kebutuhan santri antara dunia akhirat, akal dan kalbu, jasmani dan ruhani, potensi diri (internal) dan potensi lingkungan (eksternal).⁴⁰

2. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Pesantren Mu'adalah di Dirasatul Muallimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan

Untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan, Pesantren Mu'adalah ini menerapkan beberapa langkah strategis sebagai titik awal pengembangan pendidikan di dalamnya. Strategi ini merupakan refleksi pemikiran untuk melakukan pengembangan dalam pendidikan dan berbagai perubahan dengan perubahan-perubahan komprehensif sebagai respon terhadap perubahan dunia yang sedang terjadi, dan atau hasil analisis prediktif yang dilakukan secara seksama dan cermat serta holistik.⁴¹

Pesantren secara kelembagaan perlu dikembangkan dari sifat "reaktif" dan proaktif terhadap perkembangan masyarakat menjadi *rekonstruksionistik-sosial*. Menjadi *rekonsionistik-sosial* berarti pendidikan pesantren perlu aktif ikut memberi corak dan arah terhadap perkembangan masyarakat yang dicita-citakan. Strategi pencapaian standar kompetensi lulusan perlu dirancang agar mampu menjangkau alternatif jangka panjang, mampu menghasilkan perubahan yang signifikan ke arah pencapaian visi dan misi lembaga, sehingga memiliki keunggulan dan kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman.⁴²

Di antara strategi yang dilaksanakan untuk mencapai standar lulusan tersebut adalah pengaturan waktu pembelajaran antara pendidikan formal dan non formal. Pendidikan non formal dalam hal ini pesantren (baca: madrasah) mu'adalah dilaksanakan pada pagi hari antara pukul 08:30 Istiwa' sampai berkumandang adzan zhuhur. Pemilihan waktu ini didasarkan pada pertimbangan suasana kejiwaan santri yang masih relatif lebih segar dibandingkan dengan waktu siang haru. Selain itu, pembelajaran di pagi hari akan memiliki waktu belajar yang lebih panjang. Dalam sehari ada tiga jam pelajaran yang dilaksanakan oleh semua kelas. Sedangkan pendidikan formal seperti MI, MTs, dan MA diselenggarakan setelah shalat zhuhur. Pendidikan formal tersebut diperuntukkan bagi santri yang ingin bersekolah dengan dua

⁴⁰Barizi, *Pendidikan Integratif*, hlm. 54.

⁴¹Decker F. Walker and Jonas F. Soltis, *Curriculum and Aims* (New York: Teacher College Press, 1997), hlm.77.

⁴²http://www.infogoue.com/viewstory/2009/05/04/strategi_mewujudkan_madrasah_unggul/?url:http://ahmadma

program pendidikan sekaligus. Dengan penentuan jam pelajaran pada dua pola pendidikan tersebut, maka pesantren Al-Hamidy Banyuwangi menetapkan program Pesantren Mu'adalah di Dirasatul Mu'alimin Islamiyah, sebagai program wajib bagi seluruh santri baik putra maupun putri. Sedangkan pendidikan formal (siang hari) merupakan program pilihan yang boleh diambil atau tidak.⁴³

Pengaturan waktu di pesantren mu'adalah ini diberlakukan agar para santri dapat mengembangkan diri, tidak hanya pada penguasaan materi keagamaan sebagai inti dan ruh dari pesantren al-Hamidy tetapi juga dapat mengembangkan diri pada keilmuan umum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Konsep pendidikan pesantren sebenarnya cukup ideal, yaitu mengembangkan seluruh ranah yang seharusnya dikembangkan untuk melahirkan manusia yang lebih beradab dengan menggunakan agama sebagai "*code of conduct*". Pesantren, dilihat dari misi dan orientasinya merupakan institusi yang mengembangkan manusia secara lebih utuh, yaitu meliputi aspek-aspek spiritual, akhlak, intelektual dan keterampilan secara terpadu. Masyarakat modern pun saat ini di mana ketimpangan terjadi di hampir semua segi kehidupan sudah semakin menyadari betapa pentingnya pengembangan manusia secara lebih utuh ini. Berbeda dengan konsep-konsep konvensional mengenai standar kualitas lulusan pesantren yang sering diukur dengan dimilikinya kemampuan intelektual dan keterampilan-keterampilan tertentu, maka membangun manusia utuh merupakan konsep standarisasi.⁴⁴

Sejalan dengan pengaturan waktu tersebut, maka proses pembelajaran ditekankan pada strategi pembelajaran aktif, seperti metode diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Metode ini menjadi salah satu metode yang digunakan agar para santri memiliki kesempatan untuk terlibat secara lebih aktif dalam proses pembelajaran. Diskusi atau musyawarah dijadikan sebagai kegiatan utama yang ditonjolkan dari Pesantren Mu'adalah di DMI ini. Kegiatan musyawarah tersebut dilembagakan dengan nama "*Majelis Dirasah wa al-Muhadharah*". Majelis ini dilakukan setiap malam dan wajib diikuti oleh setiap santri. Musyawarah dipimpin oleh masing-masing wali kelas untuk memperdalam materi yang telah dipelajari di madrasah pada pagi harinya. Forum ini memberikan kesempatan lebih luas kepada setiap santri untuk memperdalam setiap materi pelajaran.

⁴³Hasil Wawancara dengan Nurul Huda, *Guru Tingkat Wustha*, tanggal 7 Agustus 2013.

⁴⁴Imam Suprayogo, *Pendidikan Berparadigma Al-Qur'an* (Malang: UIN Press, 2004), hlm.234.

Forum ini bersifat wajib dan hasilnya menjadi bahan laporan kegiatan pada pengasuh. Pada pelaksanaannya, forum musyawarah dan muhadharah ini dibagi pada dua pola; *pertama*, musyawarah internal kelas, yakni setiap kelas di bawah pimpinan wali kelas mendiskusikan ulang materi pelajaran yang disampaikan pagi harinya. Musyawarah internal ini dilaksanakan pada setiap malam Sabtu, Ahad dan Senin. *Kedua* adalah musyawarah gabungan antar kelas dalam satu tingkatan seperti antara kelas A, B dan C di tingkat Wustha kelas 1, kelas A, B, dan C untuk kelas II Wustha dan seterusnya. Musyawarah gabungan ini dilaksanakan pada setiap malam Selasa, Rabu dan Kamis. Sedangkan malam jum'at tidak ada musyawarah tetapi diganti dengan kegiatan lainnya seperti *muhadharah*, *shalawatan* dan lain-lain.⁴⁵

Efektif tidaknya suatu proses kegiatan pembelajaran banyak ditentukan oleh intensitas guru. Ia dituntut memiliki metode dan strategi pembelajaran yang kreatif yang mampu menghidupkan suasana belajar siswa. Di sinilah diperlukan upaya pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, karena dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan sebuah suasana yang menarik dan menyenangkan. Pembelajaran efektif akan mampu membantu siswa belajar.⁴⁶

Dalam pengamatan peneliti, metode pembelajaran melalui diskusi ini mampu merangsang santri untuk berperan aktif dalam menyampaikan pendapatnya sesuai dengan tingkat pemikiran masing-masing. Hampir setiap santri dalam kelas tersebut menunjukkan partisipasinya untuk mengkaji bahan atau materi pelajaran yang didiskusikan. Pada bagian akhir, ustadz maupun tutor memberikan kesimpulan akhir terkait tema yang didiskusikan.⁴⁷

Proses pembelajaran difokuskan pada aktivitas santri dalam memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Pembelajaran menjadi kegiatan utama pendidikan yang dalam pelaksanaannya, para guru diberi kebebasan memilih pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran peserta didik dan kondisi nyata sumberdaya yang tersedia dan siap didayagunakan di pesantren.

Melalui proses pembelajaran tersebut, para santri dapat mengikutinya secara serius dan penuh perhatian, serta tampak antusias dalam mengikuti pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru dengan penuh perhatian, dan guru pun mengajar dengan metode dan pendekatan yang variatif dan

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Badri, *Rais (kepala) Madrasah Ulya*, Tanggal 5 Agustus 2013.

⁴⁶Donald R. Cruickshank, et.al. *The Act of Teaching* (New York: Mc Graw Hill, 1995), hlm. 313.

⁴⁷Observasi tanggal 22 Agustus 2013.

menyenangkan. Oleh karena itu, guru harus melakukan pembelajaran menggunakan berbagai strategi yang dapat mendorong terjadinya suasana belajar yang kondusif sesuai dengan konteks materinya.⁴⁸

Strategi lain yang dilaksanakan oleh pesantren ini adalah evaluasi kurikulum yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Evaluasi ini dilakukan setiap akhir tahun pelajaran (minggu ke-2 Bulan Sya'ban). Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi yang ditetapkan. Demikian pula hasil evaluasi akan dijadikan rekomendasi apakah standar kompetensi tersebut perlu dirubah atau dipertahankan. Evaluasi ini menjadi sangat penting karena akan menentukan apakah kurikulum yang dilaksanakan ini masih relevan atau tidak dengan kebutuhan santri.⁴⁹

Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat menunjukkan tingkat kemampuan dan keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan dalam satu tahun atau pencapaian penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran di pesantren ini. Evaluasi kurikulum diselenggarakan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Evaluasi belajar ini dilakukan melalui *Ikhtibar al-daury* (ujian semester) dan *tamrin* (evaluasi harian) atau latihan-latihan tertentu yang pelaksanaannya diserahkan pada ustadz masing-masing mata pelajaran.⁵⁰

Di antara pelaksanaan evaluasi ini adalah mengadakan rapat rutin bulanan yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh semua unsur pesantren. Rapat rutin yang dilaksanakan setiap bulan dijadikan sebagai wahana evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung di pesantren ini. Rapat ini dipimpin oleh Pengasuh langsung (RKH. Muhammad Rofi'iy Baidhawi), atau jika beliau berhalangan, maka pimpinan rapat diserahkan pada menantu beliau yakni KH. Abrory, yang kesehariannya menjabat Mudir Pesantren. Rapat bulanan diikuti oleh majelis keluarga (pengasuh) dan segenap dewan guru dari seluruh tingkatan (Ula, Wustha dan 'Ulya). Rapat mengevaluasi program pembelajaran dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Pada rapat tersebut semua wali kelas sejumlah 19 wali kelas yang terdiri atas 5 rombongan belajar (rombel/kelas) tingkat Ula, 9 rombel/kelas Whustho, dan 5 rombel/kelas 'Ulya, diminta untuk menyampaikan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kelasnya masing-masing. Rapat tersebut juga diisi dengan saling memberikan

⁴⁸Rusman, *Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 57.

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Ahmad Syauqi, *Guru Putri Tingkat Wustha*, tanggal 5 Juli 2013.

⁵⁰Ibid.

solusi bagi setiap permasalahan yang ditemukan. Karena sifatnya yang sangat sakral dan mengikat, rapat tersebut diselenggarakan di *dhalem* (rumah) pengasuh. Dengan demikian tingkat kehadiran dan keseriusan rapat sangat diperhatikan.⁵¹

Demikian pula, evaluasi pembelajaran melalui pelaksanaan ujian kenaikan kelas dan ujian akhir kelulusan yang sangat ketat. Pelaksanaan evaluasi semacam ini diharapkan dapat menghasilkan mutu lulusan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan pesantren. Untuk menguatkan pelaksanaan evaluasi ini, maka hafalan *nazham* (bait-bait) *'Imrity* dan *Alfiyah Ibn Malik* menjadi kewajiban bagi semua santri pada semua tingkatan baik Ula, Wustha, maupun 'Ulya.

Salah satu strategi yang diambil adalah menetapkan kelulusan siswa pada masing-masing tingkat melalui Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Pesantren mu'adalah ini telah menetapkan angka 5,5 sebagai angka rata-rata Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua pelajaran pokok (*Fann Wajib*). Untuk mencapai hal ini, ujian dilaksanakan seobjektif mungkin. Ada prinsip baku yang diterapkan, yaitu "tidak ada istilah penambahan nilai ujian, tetapi tidak ada nilai yang terbuang". Implementasi prinsip ini adalah setiap mata ujian yang menghasilkan nilai desimal seperti 78, 82, 91 dan sebagainya, akan ditulis dengan angka puluhannya. Dalam contoh tersebut maka ditulis, 70, 80, dan 90. Sedangkan kelebihan akan diakumulasikan sebagai nilai lebih dan dijumlahkan secara general sebelum akhirnya dibagi menjadi nilai rata-rata. Hasil pembagian itu yang menjadi nilai akhir seorang santri. Nilai akhir tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai ketuntasan minimal yang ditetapkan untuk mengukur apakah seorang santri dinyatakan naik kelas atau tidak atau dinyatakan lulus atau tidak.⁵² Standar yang dipakai untuk bisa lulus dan naik tingkat yang lebih tinggi adalah hafalan *Nazham 'Imrity* dan *Alfiyah Ibn Malik*, santri harus hafal benar-benar hafal.⁵³

Untuk melaksanakan ujian ini, setiap guru mata pelajaran diberi kewenangan membuat soal dengan mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan. Meskipun demikian tidak semua soal yang dibuat guru mata pelajaran tersebut ditetapkan sebagai soal ujian akhir. Dalam hal ini, pesantren membentuk Badan Sensor Soal yang terdiri atas para *ruasa'* (kepala-kepala

⁵¹Ibid.

⁵²Hasil Wawancara dengan Badri, *Rais (kepala) Madrasah Ulya*, Tanggal 5 Agustus 2013.

⁵³Hasil Wawancara dengan Mohammad Samin, *Santri Kelas 1B 'Ulya*, Tanggal 22 Agustus 2013.

madrasah tingkat Ula, Wustha dan 'Ulya). Badan sensor akan memilih soal yang layak untuk dijadikan soal ujian. Pemilihan tersebut bersifat tertutup dan sangat rahasia.⁵⁴

RKH. Abrori menambahkan bahwa untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan visi pesantren, maka kenaikan kelas dan kelulusan santri dari pesantren ini ditentukan dengan standar-standar khusus sesuai dengan tingkat pendidikannya. Salah satunya adalah mampu menghafal dan menguasai kitab *Nazham 'Imrity* dan *Alfiyah Ibn Malik*, di samping kemampuannya dalam menelaah beberapa kitab kuning.⁵⁵

Evaluasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kompetensi lulusan. Para guru dituntut untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara holistik. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan berbagai bentuk penilaian sesuai dengan kondisi atau keadaan lembaga pendidikan.⁵⁶

Bentuk-bentuk penilaian semacam ini merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran yang digunakan untuk menyusun graduasi kemampuan santri, sehingga ada penanda simbolik yang dilaporkan kepada semua pihak. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif, obyektif, kooperatif, dan efektif. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas dan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran sekaligus untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan demi kesempurnaan pada masa berikutnya.

Kegiatan evaluasi pembelajaran secara umum bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari suatu program. Melalui evaluasi, berhasil tidaknya kegiatan pembelajaran dapat diketahui. Hasil dari evaluasi memberikan masukan yang berharga tentang pencapaian siswa terhadap target kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan. Lebih dari itu, hasil evaluasi tersebut memberikan masukan kepada guru dan pengambil kebijakan lainnya tentang kemungkinan perlunya peninjauan kembali terhadap rumusan kompetensi, materi, atau strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi, evaluasi tidak semata-mata bertujuan mengungkap pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga mengungkap efektifitas kegiatan pembelajaran itu sendiri.

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Badri, *Rais (kepala) Madrasah Ulya*, Tanggal 5 Agustus 2013.

⁵⁵Hasil Wawancara dengan RKH. Abrori, *Pengasuh PP al-Hamidy Banyuanyar*, Tanggal 21 Agustus 2013.

⁵⁶Ibid, hlm. 13.

Di samping itu, pencapaian kompetensi lulusan didukung dengan rekrutmen ustadz atau tenaga pengajar yang dilaksanakan dengan proses yang sangat ketat. Proses rekrutmen tenaga pengajar ini diharapkan dapat menghasilkan seorang tenaga pengajar yang profesional sesuai dengan kualifikasi keilmuannya.

Untuk menjadi tenaga pengajar di Pesantren Mu'adalah ini, seseorang harus mengikuti serangkaian tes yang dilaksanakan oleh "Dewan Formatur". Dewan ini beranggotakan majelis keluarga (pengasuh), para "ruasa" (kepala-kepala tingkatan lembaga), pengurus senior (mantan ustadz yang dipandang punya jasa besar pada lembaga dan telah pulang ke masyarakat). Lebih dari itu seseorang yang telah dinyatakan lulus sebagai calon ustadz atau tenaga pendidik wajib mengikuti kursus atau pelatihan yang diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh dewan formatur.⁵⁷

Berdasarkan analisis dokumen diketahui bahwa proses rekrutmen calon pengajar mengacu pada pedoman yang disusun oleh tim formatur, yang pada dasarnya diarahkan pada kemampuan calon dalam penguasaan kitab kuning dan kemampuannya dalam melaksanakan proses pembelajaran.⁵⁸

Proses rekrutmen ini juga diharapkan dapat menghasilkan pengajar memiliki keahlian dan kompetensi pada suatu bidang tertentu yang ditekuninya. Kualitas tenaga pengajar memang menjadi kunci utama menuju suksesnya mutu pesantren, sehingga kalau dimulai dari tenaga pengajarnya, maka nuansa akademis di pesantren tersebut akan menjadi harapan dan kebanggaan para siswa dalam belajar.⁵⁹

Hal ini perlu dipahami mengingat tenaga pengajar adalah bapak spiritual bagi anak-anak, yang akan memberikan santapan jiwa bagi mereka. Sebagaimana ungkapannya: "ustadz adalah *spiritual father* atau bapak rohani bagi seorang santri, dialah yang akan memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan membenarkannya."⁶⁰

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai *spiritual father* secara profesional, seorang tenaga pengajar di samping harus menguasai pengetahuan yang akan diajarkan kepada santri, juga harus memiliki sifat-sifat tertentu yang

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Badri, *Rais (kepala) Madrasah Ulya*, Tanggal 5 Agustus 2013.

⁵⁸Dokumen Dirasatul Mu'alimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuaanyar Palengaan Pamekasan.

⁵⁹Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 71.

⁶⁰Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *al-Tarbiyah al-Islamiyah Wa Falsafatuha* (t.t.: al-Baby al-Halaby, 1926), hlm. 139.

dengan sifat-sifat ini diharapkan apa yang diberikannya kepada santri dapat didengar dan dipatuhi, tingkah lakunya dapat ditiru dan diteladani dengan baik.⁶¹

Demikian pula untuk mengembangkan kapasitas guru dalam penguasaan kitab kuning, pesantren ini melaksanakan pengajian khusus bagi tenaga pengajar (ustadz). Semua ustadz atau tenaga pengajar di pesantren mu'adalah ini wajib mengikuti pengajian rutin setiap pagi yang diasuh oleh "Mudir" yakni RKH Abrori. Materi pengajian adalah kitab Fathul Mu'in.⁶²

Peningkatan guru diberikan dengan berbagai cara, melalui pelatihan-pelatihan, seminar, kursus-kursus dan peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga akan tercipta profil guru yang profesional yang memiliki kualifikasi tertentu, baik kualifikasi pedagogik, personal, profesional maupun sosial.

Keberhasilan proses pendidikan di dalam mencapai tujuan pendidikan sangat tergantung dari peran tenaga pengajar yang inovatif, kreatif dan profesional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan dan pengembangan tenaga pengajar dalam dunia pendidikan perlu diberikan guna meningkatkan keahlian dan kemampuannya sebagai pendidik profesional.

Selain strategi-strategi tersebut di atas, untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, pesantren mu'adalah sering mendatangkan nara sumber-nara sumber dari luar. Nara sumber berskala nasional, maupun internasional rutin didatangkan setiap akhir tahun untuk memberikan pengembangan wawasan bagi santri. Sebagai contoh, nara sumber dari luar yang pernah datang antara lain adalah Habib Ismail Bin Muhammad Bin Alwy Al-Maliki dari Arab Saudi, Habib Riziq (ketua FPI) dari Jakarta, Prof. Dr. H. Imam Suprayogo (Rektor UIN Malik Ibrahim Malang), Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan terakhir Dahlan Iskan (menteri BUMN RI).⁶³ Penjelasan tentang kehadiran para tokoh nasional dan internasional diatas ke DMI al-Hamidi di amini oleh salah seorang santri yang kebutulan juga ikut serta secara aktif dalam seluruh kegiatan penyambutan dan pelaksanaan acara-acara yang digelar untuk menambah wawasan para santri.⁶⁴

⁶¹Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 125.

⁶²Hasil Wawancara dengan Badri, *Rais (kepala) Madrasah Ulya*, Tanggal 5 Agustus 2013.

⁶³Hasil Wawancara dengan Ahmad Syauqi, *Guru Putri Tingkat Wustha*, Tanggal 5 Juli 2013.

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Mahinul Amin, *Santri DMI Tingkat Ulya*, Wawancara Langsung, Tanggal 22 Agustus 2013.

3. Prospek Lulusan Pesantren Mu'adalah di Dirasatul Mu'alimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan

Sampai saat ini, Pesantren Mu'adalah di Dirasatul Mu'alimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan telah menghasilkan ribuan alumni. Hal ini dikarenakan di Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar, program pesantren mu'adalah dijadikan program wajib dan menjadi induk dari seluruh lembaga pendidikan yang ada di pesantren Al-Hamidy. Dengan demikian seluruh santri pesantren Al-Hamidy pasti menjadi siswa di pesantren mu'adalah ini.

Jumlah lulusan yang dihasilkan oleh pesantren ini tentu saja memiliki harapan dan prospek yang sangat diharapkan oleh semua alumni untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja di sektor formal lainnya. Dari sinilah pengakuan pemerintah akan keberadaan pesantren menjadi suatu keniscayaan.

Lulusan pesantren mu'adalah di Dirasatul Mu'alimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan telah diakui oleh pemerintah, yaitu kesetaraan ijazah lulusan pesantren ini seperti halnya pengakuan pada lulusan lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan Madrasah Aliyah. Oleh karena itu, lulusan Pesantren Mu'adalah ini yang tidak langsung pulang ke masyarakat, mereka dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Setiap santri yang memperoleh ijazah dari Pesantren Mu'adalah juga dibekali dengan salinan foto kopi SK pengakuan (mu'adalah) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.⁶⁵ Dengan pengakuan tersebut, lulusan pesantren mu'adalah ini bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik negeri, maupun swasta, dan bisa juga bekerja, baik di sektor formal maupun non formal. Termasuk juga dalam hal ini adalah pengakuan pemerintah untuk menjadi guru tersertifikasi baik dari kementerian Agama, maupun dari kementerian pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan demikian, lulusan pesantren mu'adalah di Dirasatul Mu'alimin Islamiyah dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Berbekal keterampilan ilmu-ilmu keagamaan dan kemasyarakatan yang diajarkan selama di pesantren, mereka telah banyak mengisi jabatan-jabatan publik, baik formal atau non formal dan sebagainya.

Sebagai upaya standarisasi mutu pendidikan, Kementerian Agama memberlakukan verifikasi kepada setiap lembaga pesantren mu'adalah, termasuk Pesantren Mu'adalah di Dirastul Mu'allimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuanyar

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Badri, *Rais (kepala) Madrasah Ulya*, Tanggal 5 Agustus 2013.

Palengaan Pamekasan. Verifikasi atau lebih tepatnya disebut monitoring dan audit kinerja ini dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. Pada setiap dua tahun sekali pula dikeluarkan SK perpanjangan Mu'adalahnya. Terakhir Pesantren Mu'adalah di Dirastul Mu'allimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuaanyar Palengaan Pamekasan memperoleh perpanjangan SK Mu'adalah pada bulan Mei 2013 ini. Dengan ijazah Mu'adalah tersebut santri bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri atau swasta. Demikian pula bisa juga langsung bekerja, baik di sektor formal maupun non formal.

Sebagai contoh tahun 2008/2009, ada 10 lulusan Pesantren Mu'adalah di Dirastul Mu'allimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuaanyar Palengaan Pamekasan, yang menggunakan ijazah Mu'adalahnya untuk mengikuti penyaringan mahasiswa program Beasiswa di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dari 10 peserta tersebut, 9 diantaranya berhasil dan hanya 1 yang gagal. Demikian pula dapat dicontohkan, pada tahun 2010 kemarin, presiden BEM UNIRA dijabat oleh Alumni Pesantren Mu'adalah di Dirastul Mu'alimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuaanyar Palengaan Pamekasan, dan ia masuk dengan menggunakan ijazah mu'adalahnya. Demikian pula seama ini alumni mu'adalah telah banyak menjadi pimpinan-pimpinan organisasi kemahasiswaan di UIM, STAIN dan UNIRA.⁶⁶

Di samping itu, di antara sekian banyak lulusan, ada juga mereka yang memilih meneruskan mengabdikan diri di pesantren. Tidak sedikit juga mereka yang sudah menjadi guru tersertifikasi baik dari kementerian Agama, maupun dari kementerian pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan saat ini, ada juga alumni yang menjadi salah satu dosen di UIN Malang.⁶⁷

Secara umum, lulusan Pesantren Mu'adalah di Dirastul Mu'allimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuaanyar Palengaan Pamekasan dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Berbekal keterampilan ilmu-ilmu keagamaan dan kemasyarakatan yang diajarkan selama di pesantren, mereka telah banyak mengisi jabatan-jabatan publik seperti kepala desa, pengasuh pesantren, pembimbing haji, polisi dan sebagainya. Demikian pula alumni Pesantren Mu'adalah di Dirastul Mu'alimin Islamiyah Al-Hamidy juga banyak yang bekerja di sektor formal seperti guru, dosen, pegawai pemerintah, Satpam, kepala madrasah, dan sebagainya. Dalam hal ini ada beberapa alumni yang telah menduduki beberapa posisi penting, yang dapat dicontohkan seperti Ahmad Fauzi yang menjadi kepala Desa Tagengser Lao' Pasean Pamekasan, K. Manshur yang menjadi

⁶⁶Ibid.

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Ahmad Syauqi, *Guru Tingkat Wustha Putri*, Tanggal 5 Juli 2013.

tokoh agama sekaligus tokoh karismatik masyarakat di Tampojung Waru Pamekasan, Ra Yazid, yang baru beberapa tahun pulang dari pesantren, saat ini telah berhasil mendirikan pesantren sendiri dengan nama Pesantren Al- Bayan di Sana lao', di mana lembaganya telah sampai jenjang Madrasah Aliyah. Demikian pula lulusan yang banyak berhasil di luar Jawa, seperti K Sa'idi yang menjadi pengasuh pesantren di Kalimantan Timur.⁶⁸

Berkaitan dengan prospek lulusan Dirasatul Mu'alimin Islamiyah, RKH. Abrori mempunyai pandangan berbeda, beliau mengatakan bahwa yang menjadi kerisauan dan perhatian para pengasuh, khususnya KH. Muhammad Rofi'i adalah bukan bagaimana lulusan DMI dapat bekerja apa, di mana atau dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau swasta yang mana, akan tetapi sejauh mana standar kompetensi yang sudah dirumuskan oleh pesantren dapat tercapai sesuai waktu yang sudah ditetapkan, dan bagaimana kompetensi tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh pesantren dapat dikuasai oleh lulusan.⁶⁹

Berdasarkan realitas di atas, keberadaan lulusan pesantren mu'adalah di Dirasatul Mu'alimin Islamiyah al-Hamidy setara dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan Kementerian Agama.⁷⁰ Hal ini dikuatkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.1/65/2013 tentang Penetapan Status Kesetaraan (Mu'adalah) satuan pendidikan keagamaan pada pondok pesantren dengan madrasah aliyah/ sederajat, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2013.⁷¹

Pengakuan pemerintah terhadap pesantren menunjukkan terjadinya perubahan dalam pendidikan pesantren. Perubahan dalam pengembangan sistem pendidikan yang dilakukan pesantren bukan tanpa alasan. Pengembangan sistem tersebut didasarkan pada alasan "mempertahankan cara-cara lama yang masih baik, dan menggunakan cara-cara baru yang dipandang lebih baik" (*al-muhâfazhah 'alâ al-qadim al-shâlih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*). Kaidah ini menjadi nilai pokok dan falsafah yang melandasi kehidupan dunia pesantren

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Badri, *Rais (kepala) Madrasah Ulya*, Tanggal 5 Agustus 2013.

⁶⁹Hasil Wawancara dengan RKH. Abrori, *Pengasuh PP al-Hamidy Banyuwanyar*, Tanggal 21 Agustus 2013.

⁷⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009).

⁷¹Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.1/65/2013 tentang Penetapan Status Kesetaraan (Mu'adalah) Satuan Pendidikan Keagamaan pada Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah/Sederajat.

sehingga mampu mentransformasikan potensi dan menjadikan diri pesantren sebagai *agent of change* bagi masyarakat.⁷²

Adanya perubahan dalam sistem pengelolaan pesantren menggambarkan realitas dunia pesantren yang berdiri tegak di atas landasan tradisi masa lampau. Namun dengan landasan tersebut, perubahan dapat dikelola sedemikian rupa dengan membuang elemen-elemen dan kebiasaan lama dengan memasukkan elemen-elemen baru sesuai dengan kondisi perkembangan dan kebutuhan masyarakat.⁷³

Mempertimbangkan proses perubahan yang terjadi di pesantren, tampak bahwa hingga dewasa ini lembaga tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan, baik yang masih mempertahankan sistem pendidikan tradisionalnya maupun yang sudah mengalami perubahan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari waktu ke waktu, pesantren semakin tumbuh dan berkembang kuantitas maupun kualitasnya. Tidak sedikit masyarakat yang menaruh perhatian dan harapan terhadap pesantren sebagai pendidikan alternatif. Meski telah melakukan berbagai inovasi pendidikan, sampai saat ini pendidikan pesantren tidak kehilangan karakteristiknya yang unik yang membedakan dirinya dengan model pendidikan umum yang diformulasikan dalam bentuk sekolah.

Penutup

Berdasarkan uraian temuan penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan Pesantren Mu'adalah di Dirasatul Mu'alimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuaanyar Palengaan Pamekasan disusun secara berjenjang berdasarkan tingkat pendidikan yang terdiri atas:
 - a. Standar kompetensi lulusan tingkat Ula adalah pemahaman dan pengamalan *Fiqh Ubudiyah*. Standar kompetensi ini dipecah menjadi beberapa kompetensi dasar yang meliputi Thaharah, shalat, puasa, zakat, haji dengan segala cabang dan rinciannya.

⁷²Ahmad Barizi, *Pendidikan Integratif, Akar Tradisi dan Keilmuan Pendidikan Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 46.

⁷³In'am Sulaiman, *Masa Depan Pesantren, Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi* (Malang: Madani, 2010), hlm. 91.

- b. Standar kompetensi lulusan untuk tingkat Wustha adalah seperangkat pelajaran pokok (*fann wajib*) yang ditekankan adalah penguasaan Nahwu dan Sharaf.
 - c. Standar kompetensi lulusan tingkat 'Ulya adalah kemandirian santri dalam mengambil rujukan permasalahan keagamaan (*al-masail al-diniyyah*) yang akan mereka hadapi di masyarakat serta mampu menganalisis produk hukum berdasarkan redaksional dari berbagai rujukan kitab kuning.
2. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Pesantren Mu'adalah di Dirasatul Mu'alimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuaanyar Palengaan Pamekasan dilaksanakan melalui beberapa langkah, yaitu:
- a. Pengaturan waktu pembelajaran antara pendidikan formal dan non formal.
 - b. Proses pembelajaran ditekankan pada strategi pembelajaran aktif, seperti metode diskusi, tanya jawab dan sebagainya.
 - c. Evaluasi kurikulum yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, seperti rapat rutin bulanan, ujian kenaikan kelas dan ujian akhir kelulusan yang sangat ketat, dan kewajiban menghafal *nazham* (bait-bait) *'Imrity* dan *Alfiyah Ibn Malik*.
 - d. Rekrutmen ustadz atau tenaga pengajar yang dilaksanakan dengan proses yang sangat ketat.
3. Prospek Lulusan Pesantren Mu'adalah di Dirasatul Mu'alimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuaanyar Palengaan Pamekasan dapat diketahui dari adanya pengakuan oleh pemerintah, yaitu kesetaraan ijazah lulusan pesantren ini seperti halnya pengakuan pada lulusan lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan Madrasah Aliyah. Dengan pengakuan tersebut, lulusan pesantren mu'adalah ini bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik negeri, maupun swasta, dan bisa juga bekerja, baik di sektor formal maupun non formal. Termasuk juga dalam hal ini adalah pengakuan pemerintah untuk menjadi guru tersertifikasi baik dari kementrerian Agama, maupun dari kementerian pendidikan dan Kebudayaan.

Daftar Pustaka

- A'la, Abd. *Pembaruan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- al-Abrasyi, Muhammad Athiyah. *al-Tarbiyah al-Islamiyah Wa Falsafatuha*. t.t.: al-Baby al-Halaby, 1926.
- Arifin, Imron. ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Barizi, Ahmad. *Pendidikan Integratif, Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Bogdan, R.C. dan S.J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley and Sons, Inc. 1985.
- Cruickshank, Donald R. et.al. *The Act of Teaching*. New York: Mc Graw Hill, 1995.
- Djauhari, KH. Mohammad Tidjani *Masa Depan Pesantren, Agenda yang Belum Terselesaikan*. Jakarta: TAJ Publishing, 2008.
- Haedari, Amin. et al. *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. Jakarta:IRD Press, 2004.
- http://www.infogate.com/viewstory/2009/05/04/strategi_mewujudkan_madrasah_unggul/?url:http://ahmadma
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.1/65/2013 tentang Penetapan Status Kesetaraan (Mu'adalah) Satuan Pendidikan Keagamaan pada Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah/Sederajat.
- Khaeruddin. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan Implementasinya di Madrasah*. Semarang: MDC, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Mujtahid. *Pengembangan Profesi Guru*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Nafi', M. Dian. et.al. *Praksis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: Institute of Training and Development (ITD), 2007.
- Nata, Abuddin. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

- Rusman. *Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Sulaiman, In'am. *Masa Depan Pesantren, Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi*. Malang: Madani, 2010.
- Sulthon, M. dan Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: Laksbang, 2006.
- Suprayogo, Imam. *Pendidikan Berparadigma Al-Qur'an*. Malang: UIN Press, 2004.
- Suwendi. *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tholkhah, Imam dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Tilaar, H.A.R. *Standarisasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Walker, Decker F. and Jonas F. Soltis. *Curriculum and Aims*. New York: Teacher College Press, 1997.
- Wiles, John dan Josep Bondi, *Curriculum Development, A Guide to Practice*. New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2002.